



Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia

Aliffia Dewi Syahda^{1*}, Fajar Syaiful Akbar²

¹⁻²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email: aliffiaads@gmail.com¹, fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

*Penulis Korespondensi: aliffiaads@gmail.com¹

Abstract. *This study centers on examining how locally generated revenue, intergovernmental transfers, and capital spending shape the degree of regional fiscal autonomy. A quantitative framework is applied, utilizing secondary data derived from the financial statements of provincial governments across Indonesia covering the 2021–2024 period. The interrelationships among the variables are assessed using a panel data regression approach, processed with EViews version 13. The findings reveal that regional fiscal autonomy is strongly associated with the magnitude of locally generated revenue. This suggests that the ability of subnational governments to effectively harness their own revenue sources plays a crucial role in strengthening fiscal independence. In contrast, funds transferred from the central government do not significantly contribute to enhancing such independence, as they are predominantly allocated to routine expenditures. Likewise, capital outlays have yet to demonstrate a meaningful impact, given that their benefits are long-term in nature and not immediately observable within the study period.*

Keywords: *Capital Expenditure; Local Government; Local Own-Source Revenue; Regional Independence; Transfer Revenue.*

Abstrak. Studi ini berfokus pada analisis peran pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta belanja modal dalam memengaruhi derajat kemandirian keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2021–2024. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews versi 13. Kemandirian keuangan daerah terbukti dipengaruhi oleh besarnya pendapatan asli daerah. Hal ini merepresentasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Dana transfer dari pemerintah pusat tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kemandirian tersebut. Kondisi ini terjadi sebab alokasi dana transfer lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rutin. Pengeluaran dalam bentuk belanja modal juga belum mampu memberikan dampak signifikan karena manfaat yang dihasilkan cenderung bersifat jangka panjang dan belum terlihat secara langsung dalam kurun waktu penelitian.

Kata kunci: Belanja Modal; Kemandirian Keuangan Daerah; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam lanskap otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas yang berkewenangan mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri (Amin *et al.*, 2024, p. 30). Kewenangan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankannya secara efektif, diperlukan kapasitas fiskal yang memadai. Kapasitas tersebut terrefleksi dalam indikator kemandirian keuangan daerah yang merepresentasikan daya kelola pemerintah daerah dalam mengakumulasi serta memobilisasi sumber pendapatan endogen (Hartoto *et al.*, 2025, p. 237).

Kemandirian keuangan daerah dapat dipandang sebagai tolok ukur esensial dalam menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah (Dalisawintri *et al.*, 2025, *p.* 52). Tingginya kemandirian mengindikasikan adanya kapabilitas institusional pemerintah daerah dalam mengeksplorasi potensi ekonomi endogen melalui penguatan basis pendapatan asli daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menekankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketahanan kapasitas fiskal meleluaskan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang bersifat kontekstual dan responsif (Ibrahim *et al.*, 2024, *p.* 81).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami defisit akibat ketidakseimbangan anggaran dan keterbatasan kas daerah sehingga sebagian dana alokasi khusus dialihkan untuk menutup kebutuhan kas (Yanti, 2025). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit sekitar 80,18% dari total anggaran tahun 2024 akibat kuatnya keterikatan fiskal daerah pada skema transfer pemerintah pusat serta tidak tersalurkan sebagian dana transfer sesuai target (Syafudin, 2025). Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil yang menyebabkan kekurangan penerimaan daerah dan menghambat realisasi belanja pemerintah daerah (Riau Televisi, 2025).

Kemandirian fiskal daerah dipengaruhi oleh struktur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah menjadi faktor utama karena berasal dari potensi ekonomi lokal (Nailufar *et al.*, 2026, *p.* 116). Ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer dari pusat dapat menurunkan kemandirian daerah (Harmadji *et al.*, 2025, *p.* 52). Belanja modal juga berperan penting karena mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah (Jatnika *et al.*, 2024, *p.* 58).

Temuan Setiawan *et al.* 2021 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan transfer juga berhubungan dengan kemandirian, di mana besarnya mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada pusat (Kinanti & Santorry, 2025). Belanja modal turut berperan sebagai determinan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Sulistiyawati *et al.*, 2024).

Penelitian terdahulu tentang determinan kemandirian keuangan daerah masih terbatas pada cakupan wilayah tertentu, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga belum merepresentasikan kondisi secara nasional. Penggunaan metode analisis yang relatif sederhana membuat hubungan kompleks antar variabel belum tergambarkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia.

Keterbatasan penelitian terdahulu mendorong perlunya kajian yang lebih luas untuk memperoleh gambaran kemandirian fiskal daerah secara nasional. Studi ini berfokus pada hubungan antara pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Pendekatan kuantitatif diimplementasikan melalui pemodelan regresi data panel dengan memanfaatkan laporan keuangan pemerintah provinsi yang dipublikasikan.

2. KAJIAN TEORITIS

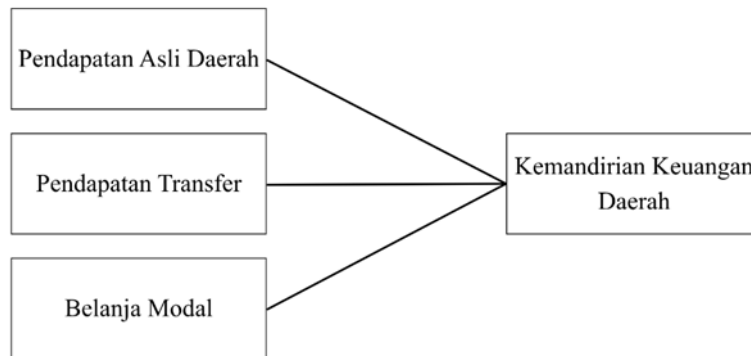
Teori *fiscal federalism* oleh Oates (1972) menekankan pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah untuk mencapai efisiensi dan pemerataan layanan publik. Pemerintah daerah dinilai lebih mampu memahami preferensi lokal sehingga pengelolaan belanja menjadi lebih tepat. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan keberhasilan desentralisasi fiskal melalui rendahnya ketergantungan pada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat dipahami sebagai kapabilitas pemerintah daerah dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli daerah sebagai basis utama (Suryantini *et al.*, 2025, p. 187). Tingkatnya mencerminkan ketergantungan pada dana transfer pusat. Rasio yang tinggi menunjukkan optimalisasi potensi ekonomi lokal dan menjadi indikator penting keberhasilan desentralisasi fiskal.

Pendapatan asli daerah merepresentasikan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelaborasi potensi ekonomi lokal melalui instrumen fiskal seperti pajak daerah, retribusi, serta berbagai sumber penerimaan sah lainnya. Kontribusi yang tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Dalisawintri *et al.*, 2025, p. 36). Peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Mahardika & Fauzan (2022) serta Sefira & Budiwitjaksono (2022) menegaskan bahwa kapasitas PAD yang tinggi memperkuat pembiayaan mandiri.

Pendapatan transfer merupakan dana dari pemerintah pusat kepada daerah melalui dana alokasi umum, khusus, dan bagi hasil untuk mendukung pembangunan dan pemerataan fiskal. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer menunjukkan rendahnya otonomi fiskal serta berpotensi menurunkan insentif optimalisasi pendapatan asli daerah (Zairin *et al.*, 2026, p. 50). Kinanti & Santorry (2025) menemukan bahwa besarnya dana transfer mencerminkan ketergantungan yang dapat menghambat kemandirian daerah, sementara Setiawan *et al.* (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal merupakan alokasi fiskal untuk pembangunan aset tetap berjangka panjang seperti infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga memperkuat kapasitas dan ketahanan fiskal (Roreng & Pasaloran, 2025, p. 46). Sulistyawati *et al.* (2024) menemukan bahwa belanja modal dapat meningkatkan ekonomi daerah dan pendapatan, sedangkan Mahardika & Fauzan (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Sumber: Data Peneliti (2026).

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H2: Pendapatan transfer berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H3: Belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari laporan keuangan pemerintah provinsi yang diperoleh melalui sumber resmi. Periode pengamatan mencakup 2021–2024 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Seluruh 34 provinsi dijadikan sampel melalui metode sensus. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan *EViews* 13.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukurannya.

Variabel	Pengukuran	Skala
Kemandirian keuangan daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Pendapatan asli daerah (X1)	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	Rasio
Pendapatan transfer (X2)	$\frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$	Rasio
Belanja modal (X3)	$\frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Belanja Modal}}$	Rasio
	$\frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Belanja Modal}}$	

Sumber: Hartoto (2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah provinsi di Indonesia dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi derajat kemandirian keuangan daerah. Pemilihan level provinsi didasarkan pada kapasitas kewenangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan serta peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal wilayah. Eksplorasi penelitian ini menitikberatkan pada kemandirian keuangan daerah sebagai manifestasi kapabilitas fiskal.

Tabel 2. Hasil Pengujian Model Regresi Data Panel.

Metode Pengujian	Pendekatan Statistik	Probabilitas	Rekomendasi
Uji <i>Chow</i>	<i>Cross-section F</i>	0,0000	<i>Fixed effect</i>
Uji <i>Hausman</i>	<i>Cross-section random</i>	0,0700	<i>Random effect</i>
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Breusch-Pagan</i>	0,0000	<i>Random effect</i>

Sumber: Data Diolah (2026).

Hasil tabel 2 menunjukkan model *random effect* paling sesuai. Uji *Chow* mengarah ke *fixed effect* ($0,0000 < 0,05$), namun uji *Hausman* ($0,0700 > 0,05$) dan *Lagrange Multiplier* ($0,0000$) menguatkan bahwa *random effect* lebih tepat dibandingkan model lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas.

Nilai <i>Jarque-Bera</i>	Probabilitas	Kesimpulan
1,398235	0,497024	Data terdistribusi normal

Sumber: Data Diolah (2026).

Hasil tabel 3 menunjukkan Nilai probabilitas yang melampaui ambang signifikansi 0,05 mencerminkan bahwa sebaran data mengikuti pola distribusi normal. Keadaan tersebut menandakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,306872	-0,169607
X2	-0,306872	1,000000	0,393624
X3	-0,169607	0,393624	1,000000

Sumber: Data Diolah (2026).

Tabel 4 memperlihatkan nilai korelasi X1 dan X2 tercatat -0,306872, hubungan X1 dan X3 -0,169607, sedangkan X2 dan X3 0,393624. Seluruh koefisien tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas 0,9. Pola ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala keterikatan linear yang berlebihan antar variabel bebas, sehingga model terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	-0.491778	-1.051980	0.2947
Pendapatan asli daerah (X1)	0.750608	1.571465	0.1185
Pendapatan transfer (X2)	0.578038	1.228933	0.2213
Belanja modal (X3)	0.154173	0.940308	0.3488

Sumber: Data Diolah (2026).

Tabel 5 merepresentasikan tidak adanya indikasi ketidaksamaan varians dalam model. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa model regresi telah memenuhi kriteria keseragaman varians.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi.

Nilai dL	Nilai dU	Nilai d	Kesimpulan
1.6751	1.7652	1.311653	Terdapat autokorelasi positif

Sumber: Data Diolah (2026).

Nilai d 1,311653 < dU 1,7652 menunjukkan adanya autokorelasi positif sehingga model belum memenuhi asumsi klasik. Masalah ini kemudian diatasi dengan metode *first difference* untuk menghilangkan korelasi *error*.

Tabel 7. Hasil Penyembuhan Uji Autokorelasi.

Nilai dL	Nilai dU	Nilai d	Kesimpulan
1.6751	1.7652	2.797307	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Diolah (2026).

Setelah perbaikan, nilai d 2,797307 > dU 1,7652. Meskipun berada di atas batas ($4 - dU$) = 2,2348, hasil ini menunjukkan model tidak mengalami autokorelasi, sehingga asumsi bebas autokorelasi dinyatakan terpenuhi.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel.

Variabel	Koefisien
C	-0.136917
Pendapatan asli daerah (X1)	3.410914
Pendapatan transfer (X2)	-0.780934
Belanja modal (X3)	0.314268

Sumber: Data Diolah (2026).

Tabel 8 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif (3,410914), pendapatan transfer berpengaruh negatif (-0,780934), dan belanja modal berpengaruh positif (0,314268). Nilai konstanta sebesar -0,136917 menggambarkan kondisi saat seluruh variabel independen bernilai nol.

Kemandirian Keuangan Daerah_{*i,t*}

$$= \alpha + \beta_1 \text{Pendapatan Asli Daerah}_{i,t} + \beta_2 \text{Pendapatan Transfer}_{i,t} + \beta_3 \text{Belanja Modal}_{i,t} + e$$

Tabel 9. Hasil Uji *T*.

Variabel	t-Statistik	Probabilitas	Interpretasi Hasil
Pendapatan asli daerah (X1)	4.837918	0.0000	Berpengaruh
Pendapatan transfer (X2)	-1.129227	0.2608	Tidak berpengaruh
Belanja modal (X3)	1.281174	0.2024	Tidak berpengaruh

Sumber: Data Diolah (2026).

Pendapatan Asli Daerah

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Peningkatan PAD memperkuat otonomi fiskal, sejalan dengan teori *fiscal federalism*. Hasil ini didukung oleh Sefira & Budiwitjaksono, (2022) yang menegaskan peran penting PAD dalam meningkatkan kemandirian, di mana daerah dengan PAD tinggi cenderung lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Hipotesis pertama diterima.

Pendapatan Transfer

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan probabilitas $0,2608 > 0,05$, sehingga pendapatan transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan Setiawan *et al.* (2021) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan. Dominasi dana transfer mencerminkan ketergantungan fiskal, terlebih karena penggunaannya cenderung untuk belanja rutin sehingga tidak meningkatkan kapasitas fiskal mandiri. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak.

Belanja Modal

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan probabilitas $0,2024 > 0,05$, sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan Mahardika & Fauzan (2022). Belanja modal berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi, namun efeknya cenderung bersifat jangka panjang (*lagged effect*) dan bergantung pada kualitas perencanaan serta pelaksanaan. Akibatnya, kontribusinya terhadap kemandirian fiskal belum terlihat, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah lebih ditentukan oleh optimalisasi pendapatan asli daerah dibandingkan sumber pendanaan lainnya. Implikasi teoretisnya memperkuat konsep *fiscal federalism* yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal berbasis sumber internal. Dari sisi praktis, diperlukan strategi kebijakan yang inovatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada belum terperinci klasifikasi komponen pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan disaggregasi pendapatan secara lebih detail agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M., Wahyunadi, W., & Baehaqi, B. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat* (A. Khanafi (ed.)). Sleman: Deepublish Digital.
- Dalisawintri, D., Noor, M., & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* (M. Taufik (ed.)). Klaten: Nas Media Pustaka.
- Harmadji, D. E., Zarina, Z., Hamidi, A. A., Sari, A., Hady, A. R. K., Andreawan, A., Putri, D., Yuswanita, L., Fathony, H. R., Syahputra, M. F., Husni, M., & Darmawan, I. M. D. H. (2025). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (D. P. Sari (ed.)). Padang: Get Press Indonesia.
- Hartoto, H., Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, S., Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)* (H. Hartoto (ed.)). Bandung: Widina Media Utama.
- Ibrahim, M. A., Aslinda, A., & Radjab, M. (2024). *Penguatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Birokrasi Pemerintah Daerah* (A. Azhaar (ed.)). Sleman: Deepublish Digital.
- Jatnika, I., Suryadi, D., & Suryadi, E. E. (2024). *Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli dan Belanja Modal Pemda Purwakarta* (N. Nurhaeni (ed.)). Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Kinanti, M. A., & Santorry, S. (2025). Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(2), 138–157.
- Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Nailufar, F., Juanda, R., Albra, W., & Abubakar, J. (2026). *Otonomi dan Keuangan Daerah*. Pesisir Selatan: Lenggo Geni Pustaka.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal (Studi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2014–2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 95–106. <https://doi.org/10.30737/jamm.v8i2.88>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Riau Televisi. (2025). Defisit APBD Riau 2024 Rp1,76 Triliun, DPRD Didesak Tak Diam. *Riautelevisi.Com*, 1. <https://www.riautelevisi.com/berita-defisit-apbd-riau-2024-rp176-triliun-dprd-didesak-tak-diam.html>
- Roreng, P. P., & Pasaloran, O. (2025). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia* (W. R. Wati (ed.)). Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma.
- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(3), 938–947.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD,

DAU, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*, VII(1), 44–53.

- Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian Empiris Faktor-faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Suryantini, N. P. S., Arsawan, I. W. E., Mahanavami, G. A., Amrita, N. D. A., & Parwita, G. B. S. (2025). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (M. A. Wardana (ed.)). Badung: Intelektual Manifes Media.
- Syafrudin, A. (2025). APBD Kalteng 2024 Defisit 80,18 Persen, Pemprov Akan Genjot PAD agar Tak Bergantung Dana Transfer Pusat. *Beritasampit.Com*, 1. <https://beritasampit.com/2025/06/20/apbd-kalteng-2024-defisit-8018-persen-pemprov-akan-genjot-pad-agar-tak-bergantung-dana-transfer-pusat/>
- Yanti, E. (2025). Pemprov Sultra Defisit Anggaran Rp 777 Miliar, Utang Rp 757 Miliar Termasuk Dana PEN untuk Jalan Toronipa dan RS Jantung. *Telisik Indonesia*, 1. <https://telisik.id/news/pemprov-sultra-defisit-anggaran-rp-777-miliar-utang-rp-757-miliar-termasuk-dana-pen-untuk-jalan-toronipa-dan-rs-jantung>
- Zairin, M., Tampubolon, D., Wahyudi, Z., Talla, A., Mulyaningsih, N., Patty, M. R., Soukotta, A., & Rumtutuly, H. H. (2026). *Manajemen Keuangan Daerah* (H. Hardin (ed.)). Yogyakarta: Edu Akademi.